

Bab II

Politik dan militer di Thailand

A. Perjalanan perpolitikan Thailand

Di tahun 1932 monarki absolut di gulingkan oleh sebuah kelompok kecil yang terdiri dari militer dan sipil. Kelompok kecil tersebut di pimpin oleh Phibun Songkram dan Pridi Phanomyong yang mana mereka berhasil merebut kekuasaan dalam kudeta militer tersebut . Setelah merebut kekuasaan lalu mereka mengubahnya dari sistem monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusional. Ketika terjadinya kudeta militer pada saat itu Thailand di pimpin oleh Raja Prajahdipok. Pridi merupakan salah satu perancang utama konstitusi di tahun 1932 dan telah menjanjikan pemilihan secara langsung setelah sebagean warganya menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Ketika lingkungannya menjadi sebuah nominasi termasuk elemen nasionalisasi dia pun dicap sebagai bagian dari komunis dan mengakibatkan kudeta secara berturut-turut yang di lakukan oleh militer . Akibat terjadinya kudeta yang terus-menerus makanya politik Thailand berada di posisi stabil dibawah antiroyalis jenderal Phibun Songkram . Setelah terjadinya perang, Pridi terpilih menjadi perdana menteri pertama di Thailand ¹⁸. Awal tahun 1933 saat Pridi sedang menyusun rencana ekonomi untuk negara yang jauh lebih radikal dibanding bisa diterima oleh anggota pemerintahan baru sehingga mengakibatkan raja terpaksa menangguhkan Majelis Nasional . Para

¹⁸ Ginsburg, Tom. 2009. Constitutional afterlife: The continuing impact of Thailand's postpolitical constitution. Oxford University Press and New York University School of Law.

pemimpin militer pun khawatir yang mana kaum royalis akan mendapatkan kembali atas pemerintahan dengan cara memaksa rekonstitusi kepada Majelis Nasional. Rekonstitusi kepada Majelis Nasional tersebut diikuti oleh usaha penentang royalis pada Oktober 1933 di bawah Pangeran Boworadet yang merupakan sepupu sang Raja . Meskipun tidak terbukti adanya kolusi didalam kerajaan tetapi Prajadhipok menemukan bahwa posisinya tidak dapat di pertahankan . Awal tahun 1934 dia berangkat menuju Inggris lalu di tahun 1935 turun tahta sebagai gantinya dengan ditunjuk untuk bertindak sebagai pengganti yaitu Pangeran Ananda Mahidol .Pangeran Ananda Mahidol saat itu merupakan seorang anak sekolah yang sedang belajar di Swiss hingga dia dewasa. Revolusi Monarki tahun 1932 berhasil dikarenakan adanya dukungan oleh militer yang dipimpin oleh Perwira nonroyal. Diantara tahun 1933 dan akhir 1938 pertumbuhan militer sangat kuat ¹⁹

Pada tahun 1938 Phibun Songkram terpilih menjadi perdana menteri dan kembali merebut kekuasaannya kembali . Phibun Songkram pun selaras dengan jepang selama perang dunia II lalu mengubah dari Siam ke Thailand yang di harapkan dari perubahan nama tersebut adalah membalikan sejarah singkat nama siam selama masa pemeritahan sipil di tahun 1940an²⁰ . Pada bulan juni 1946 Raja Bhumibol naik tahta setelah kematian saudaranya Raja Ananda Mahidol²¹. Di tahun 1950 pada saat Raja Bhumibol naik tahta belum terlihat

¹⁹ .“The 1932 coup and the creation of a constitutional order” diakses dari <https://www.britannica.com> pada 20 Maret 2018 pukul 08.00

²⁰ Funston,John.2001.Government and politics in Southeast Asia.Institute of Southeast Asian studies.Singapore.

²¹ Farrelly,Nicholas.2013.Why democracy struggles: Thailand’s elite coup culture.Australian Journal of International Affairs.Vol. 67 hal 285.

pengaruh politik dari sistem monarki yang masih sangat terbatas. Pengaruh politik dari sistem monarki sampai kedalam kerajaan dan mereka pun telah menolak tindakan penindasan yang di dilakukan oleh pemerintahan di bawah pimpinan Phibun atas aktivitas monarkinya . Raja Bhumibol merupakan seorang Raja konstitusional di Thailand tidak seperti kebanyakan negara terjajah di Asia Tenggara, selain itu juga mempertahankan seorang raja konstitusional. Akhirnya di tahun 1957 ketika monarki menemukan sebuah kesempatan untuk mendapatkan kembali perannya dalam politik Thailand dan bekerjasama dengan militer Sarit . Tahun 1947 , Pemerintahan sipil yang saat itu berumur pendek mengikuti berakhirnya kedudukan jepang tetapi militer melangkah mundur kedalam lanskap perpolitikan Thailand di tengah skandal korupsi dan kematian dari raja muda. Kudeta ini memungkinkan untuk kembalinya orang kuat pada masa perang dan nasionalis yaitu Field Marshal Plaek Phibunsongkram .

Phibunsongkram dikenal karena menyediakan negara yang sebelumnya disebut dengan Siam diantara lainnya dan nama saat ini (Thailand) digunakan untk mempromosikan etnis sebagai identitas. Tindakan yang dilakukan Phibunsongkram paling jelas menunjukkan peran penting militer dalam menempa suatu indentitas nasional dari penduduk kerajaan ²² . Enam tahun kemudian setelah kejadian itu pemimpin militer Phibunsongkram menjadi perdana menteri . setelah berakhirnya perang dunia II maka militer melancarkan kudeta pada tahun 1947 dan tetap berkuasa hingga 1973. Hanya selama kurang lebih tiga tahun pemerintah sipil diikutinya sebelum terjadi penumpasan darah pada

²² Wanichakorn, Wason .” Thailand: Coups That Helped Shape the Land of Coups” diakses dari <http://time.com> pada 9 Agustus 2018 pukul 8.24

saat demonstran mahasiswa kembali . Banyak kudeta dan pemerintah koalisi berada dalam posisi tidak stabil di pimpin oleh perdana menteri yang ditunjuk lalu membawa Thailand ke tahun 1992. Ketika para pengunjung rasa pro demokrasi memenuhi jalanan di Bangkok menuntut kembalinya pemerintah. Raja Bhumibol Adulyadej melangkah masuk dan meminta para jenderal dan pemimpin pro demokrasi untuk melakukan rekonsiliasi perbedaan . Mereka pun melakukannya dan pemimpin partai Demokrat Chuan Leekpai mengambil alih kekuasaan . kudeta yang selanjutnya guna membentuk kembali negara Thailand yaitu akar dari kebuntuan politik dalam pengambilalihan militer terbaru²³.

Tahun 1980an peregangan demokrasi pun terlihat dan lebih panjang sementara intervensi mulai jarang terjadi . Namun dalam beberapa tahun yang lalu politik mulai kembali ke panggung utama . Ditandai dengan konflik berkepanjangan antara aliansi kaos merah sebagai pendukung perdana menteri Thaksin Shinawatra yang sebagian berasal dari Thailand pedesaan , utara serta timur laut . Partai politik yang terkait dalam hal tersebut adalah Pheu Thai . Aliansi dari kelompok lain di kenal sebagai kaos kuning yang mencakup elite tradisional , kelas menengah perkotaan dan beberapa pemimpin dari partai lain (Partai Demokrat). Beberapa partai politik Thaksin telah memenangkan setiap pemilihan umum sejak 2005 . Dari tahun 1980 sampai pertengahan tahun 2000an negara Thailand kembali ke sistem demokrasi kecuali untuk periode yang singkat yaitu Tahun 1991 dan 1992. Tahun 1992 terjadi protes Black May guna melakukan

²³ “ Thailand army's pivotal role in politics”
diakses dari <https://www.bbc.com> pada 9 Agustus 2018 pukul 09.00

perlawanan terhadap Suchida Premiership Kraprayoon . Aksi protes tersebut menyebabkan sedikitnya 52 demonstran tewas. Setelah terjadi intervensi yang dilakukan oleh Raja Bhumibol Adulyadej akhirnya Suchida memutuskan untuk mengundurkan sebagai perdana menteri .

Bulan Januari 2001 diadakannya pemilihan parlemen yang mana Partai Thai Rak Thai mendominasi. Thaksin seorang pendiri dari Partai Thai Rak Thai lalu pindah ke pusat politik di Thailand dan sebagai pengusaha yang sangat sukses serta pendiri perusahaan telekomunikasi terbesar. Thaksin sangat populer di daerah pedesaan Jaringan politiknya pun mendapat banyak dukungan dari komunitas bisnis di Thailand. Sumber kekayaan yang dimilikinya dapat mendanai kampanye politik dengan cara menggunakan metode periklanan. Thaksin sering menggunakan dana dari rekeningnya untuk memastikan para pemilih yang kuat. Berbagai upaya dilakukannya yaitu menyediakan perawatan kesehatan dengan harga terjangkau untuk warga miskin , mengalihkan kewenangan yang terpusat ke organisasi pemerintahan lokal , menyediakan dana pinjaman besar bagi masyarakat desa dan membuat investasi dalam hal pendidikan . Awal tahun 2005 diadakannya pemilihan dan Partai Thai Rak Thai memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Kemenangan tersebut adalah hal yang terjadi pertama kalinya di Thailand dalam pemilihan terbuka meskipun Thaksin berada di posisi untuk membentuk sebuah politik di masa mendatang. Thaksin pun membuat beberapa keputusan yang akhirnya merusak otoritas serta menuju krisis politik . Keputusan yang dibuat oleh Thaksin adalah menggunakan kekuatan militer untuk menekan pemberontakan yang terjadi di daerah berpenduduk melayu muslim di bagian selatan tanpa adanya pemberian solusi. Hal itu yang ada memperparah permasalahan konflik dan kekerasan pun

semakin intensif . Ketika memasuki ke 60 tahun Raja menduduki Tahtanya mendekatin 2006 publik diingatkan bahwasannya dia tidak ada menjadi Raja terlalu lama . Transisi kerajaan tampaknya memberikan Thaksin kesempatan guna meningkatkan kekuatan pemerintahan terpilih dengan adanya dukungan dari rakyat yang kuat . Selain itu terdapat keinginan Thaksin untuk menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi parlemen serta badan pengantur . Badan pengantur itu diciptakan oleh konstitusi 1997 guna melindungi kekayaan dan keluarganya dan banyak sekali anggota kelas menengah perkotaan yang marah di akhir tahun 2005 .

Aksi demonstrasi dilaksanakan di Bangkok yang langsung di pimpin oleh Oposisi Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) . Alisansi tersebut berbasis di perkotaan lalu dikenal sebagai “Kaos kuning“ . Demonstrasi tersebut dikarenakan Thaksin telah kehilangan ksetiaan terhadap perwira militer dan tidak dapat memerintakan pasukan guna memberikan penekanan kepada para demontran. Thaksin pun meminta untuk mempercepat pemilihan untuk menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan banyak dukungan dari penduduk pedesaan . Dia tetap bertanggung jawab atas pemerintahan sementara selama beberapa bulan kedepan yang mana publik sedang mempersiapkan perayaan enama dasawarsa Raja sebagai Kepala Negara . Pada akhirnya tepatnya di bulan September 2006 pasukan militer yang di pimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratkalin melaksanakan kudeta sementara²⁴. Pada tahun 2006 politik Thailand mengalami perubahan pola yang tidak beraturan

²⁴ . Charles F .Keyes .” Attempts to institute populist democracy Thaksin Shinawatra” diakses dari <https://www.britannica.com> pada 14 Agustus 2018 pukul 21.00 .

dimana militer telah melakukan kudeta sebanyak 2 kali dan membatalkan 2 konstitusi. Dua konstitusi tersebut oleh Raja telah disetujui charter interim dan satu konstitusi “permanen” selain itu pengadilan juga membubarkan empat partai politik, membatalkan dua pemilihan dan menggulingkan tiga perdana menteri yang terpilih . Pada 19 september 2006 ketika angkatan darat kerajaan Thailand menggulingkan pemerintahan terpilih Thaksin Shinawatra sebagai perdana menteri dan pengambilan alih . Thaksin pergi mengasingkan diri dengan adanya paksaan untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi meskipun itu dia tetap mempengaruhi perpolitikan Thailand dari Luar negeri. Pengambilan alih tersebut di lakukan dalam waktu satu hari yang mana akan menurunkan peringkat Freedom House Thailand dari free sampai ke bebas. Penurunan peringkat tersebut merupakan perubahan pemerintahan dari non konstitusional yang pertama di negara Thailand sejak kudeta bulan Februari 1991 (kudeta kedelapan belas sejak sejarah politik modern Thailand pada tahun 1932),. Setelah lima belas tahun di mana kendali pemerintah telah berpindah alih hanya melalui pemilihan umum, tampaknya Thailand telah mengambil langkah mundur yang besar . Peristiwa pada bulan tersebut mengakiri krisis politik yang di dengar sejak awal tahun 2005 , saat partai Thaksin Thai Thaksin (TRT) Thailand dimana memenangkan pemilihan ulang dengan suara penuh dalam pemungutan suara untuk parlemen sejak kudeta 2006²⁵ .

Pemikiran terbaru dari adanya ketidakstabilan politik Thailand dimulai sejak awal tahun 2006 saat

²⁵ Pongsudhirak, Thitinan. 2008. Thailand since the coup .Journal of Democracy Volume 19. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Partai Thai Rak Thai (TRT) terjadi penekanan dengan cara meningkatkan sebuah kecaman tentang konflik kepentingan , korupsi dan kronisme dalam partai yang berkuasa . Partai yang berkuasa pada saat itu adalah TRT di karenakan selalu memenangkan pemilu dengan margin yang semakin besar dan pembagian suara di Thai House . Di Thai House sendiri perolehan suara pada pemilu tersebut tumbuh dari 40,6 persen tahun 2001 menjadi 56,4 persen , tahun 2005 menjadi 60 persen pada tahun 2006 . Dari hal itu muncul sebuah pertanyaan apakah Thailand dapat memulai awal dari partai tunggal mendominasi dan mempunyai kekuasaan kuat seperti negara tetangga yaitu Indonesia dan Malaysia . Pendapat negatif publik pun meningkat pada Januari 2006 ketika keluarga Shinawatra menjual saham mereka yaitu Shin Corp kepada Temasek Group Singapura . Penjualan saham tersebut berdasarkan kesepakatan yang mana keluarga Shinawatra tidak membayar pajak . Penyebab keluarga Shinawatra tidak membayar pajak dikarenakan Thai Telecommunications Act disahkan pada hari yang sama dengan penjualan. Penjualan tersebut menaikan batas-batas holding asing di perusahaan telekomunikasi asal Thailand itu menjadi 49 persen. Transaksi tersebut mengakibatkan keluarga Shinawatra bebas dari pajak sebesar US\$ 1,8 miliar . Prestasi seperti ini seharusnya tidak mungkin terjadi dalam konstitusi 1997 telah melindungi Thailand dengan beberapa “ Lembaga superintenden” seperti Komisi Pemilihan , komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyerukan pemilihan pada 2 April ²⁶.

Thaksin merupakan perdana menteri pertama yang di pilih kembali dalam sejarah Thailand . Politiknya

²⁶. Malesky,Edmund. Krislert Samphantharak.2011. Undertanding Thailand’s ongoing political crisis. The german Marshal Fund of The united state.

pun mengangkau di kalangan masyarakat pedesaan di wilayah timur dan utara yang mana wewakili mayoritas penduduk. Keluarganya pun berada di kota utara dari Chiang Mai. Thaksin mempengaruhi politik mereka melalui kebijakan populis yang bertujuan mengurangi kemiskinan pedesaan yaitu dengan cara menyediakan dana pengembangan kredit mikro dan perawatan kesehatan universal . Menurut sejarawan Thailand yaitu Winichakul bahwa para kaum elit royalis mengecam agenda perpolitikannya ,menuduh adanya populisme dan pembelaan suara yang di lakukan oleh Thaksin . Namun dasarnya transformasi penduduk pedesaan dari kemiskinan dan buta huruf merupakan suatu keuntungan bagi negara tetapi juga membuka jalan untuk popularitas politik Thaksin ²⁷. Dia terpilih secara demokratis di negara yang sangat jauh dari kata demokrasi sebenarnya .Negara Thailand mencampur otokrasi dengan gaya pemerintahan yang mirip dengan Inggris yaitu menjadi kesatuan melalui kerangka kerja dan melesat ke sebuah konsep monarki konstitusional . Thaksin juga menjual beberapa saham perusahaan miliknya senilai lebih dari satu miliar dolar AS kepada para investor asing tanpa membayar pajak dan mengakibatkan adanya revolusi. Setelah terjadinya kudeta militer negara Thailand dalam beberapa tahun sempat mengalami kerusuhan politik. Beberapa negara kekuatan dunia seperti Amerika , China, dan Rusia menyaksikan Jenderal Surayud Chulanont menjabat sebagai Perdana Menteri ke 24 hanya selama 1 tahun lebih 120 hari sebelum akhirnya menetapkan konstitusi kerajaan Thailand pada tahun 2007 . Dalam konstitusi kerajaan Thailand yang mana memodifikasi

²⁷. Elaine Haller “ In the Name of the People? Political protests in Thailand and the underlying conflict”, di akses dari <https://www.boell.de> pada 08 agustus 2018 pukul 10.00 .

aturan-aturan sebelumnya mengenai pemerintahan guna menstabilkan konsep perpolitikan di negara itu²⁸.

Dalam pemilihan umum yang di adakan pada 23 Desember 2007 dengan jumlah kursi 480 . Partai kekuatan Rakyat (PPP) sebagian besar terdiri dari pendukung mantan perdana menteri Thaksin yang bekas kudeta menjadi partai pertama dengan meraih 233 kursi . Pemilihan umum ini merupakan yang pertama diadakan berdasarkan konstitusi baru saja di tetapkan pada Agustus lalu di pemerintahan semenatar dan mendapat banyak perhatian karena dianggap sebagai putusan publik atas kudeta . Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menganjurkan bahwa akan mengikuti kebijakan dari Partai Thai Rak Thai terdahulu seperti investasi publik untuk proyek transportasi massal serta langkah mengatasi daerah pedesaan di wilayah bagian utara dan timur laut . Di sisi lain juga mantan oposisi besar seperti Partai Demokrat tidak dapat memperoleh suara sebanyak – banyaknya dikarenakan terlepas dari rasa anti Thaksin . Kebijakan ekonomi utama yang mereka janjikan seperti proyek transportasi massal dan perawatn kesehatan bersubsidi mirip dengan PPP dan tidak mempunyai orisinalitas . Setelah pemilihan selesai terdapat enam partai tidak termasuk Partai Demokrat setuju untuk membentuk sebuah koalisi yang di pimpin oleh PPP. Pembentukan koalisi tersebut menghasilkan pemerintahan koalisi yang menduduki dua pertiga dari kursi DPR ²⁹.

²⁸. “ Thailand : A Very Brief Political History” diakses dari <https://josephkaminski.org> pada 04 juni 2018 pukul 08.00

²⁹ . Thailand’s Restoration of Civil Government and Future Issues.2008.Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ . VOL 3. NO1. March 2008

Pada Februari 2010 pemerintahan di bawah pimpinan Abhisit menyita kurang lebih hampir 50 miliar bahts aset milik mantan Perdana Menteri sebelumnya yaitu Thaksin Shinawatra. Hal tersebut mendorong Thaksin segera mengajukan permohonan kepada para pendukungnya selain itu mungkin menyebabkan paling cepat dari keputusan UUD guna melakukan aksi protes. Pemerintah menolak melakukan negosiasi dengan para pendomontrasi guna memenuhi tuntutan mereka ³⁰. Sejak Maret 2010 para demonstiran anti pemerintah yang menamakan dirinya sebagai kelompok “ Kaus Merah “ mulai masuk ke pusat ibukota yaitu Bangkok tepatnya pada hari jumat 12 Maret 2010. Para demonstiran menggelar aksi protes besar guna menuntut Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva yang berkuasa sejak bulan Desember 2008 untuk mundur dari jabatannya, adanya pembubaran parlemen dan di gelarnya pemilihan umum dalam waktu satu bulan . Aksi demonstiran yang terjadi di pusat kota Bangkok mengakibatkan puluhan orang tewas dan terluka selain itu rusaknya infrastuktur . Pasca terjadinya demonstrasi yang menelan banyak korban jiwa maka pemerintah Thailand menerapkan status darurat sejak 7 April 2010 . Status darurat yang di terapkan oleh pemerintah Thailand tersebut berupa adanya larang untuk berkumpul lebih dari 5 orang . Setelah hampir dua bulan lamanya Thailand mengalami kondisi yang tidak menentu akhirnya pada 19 Mei 2010 Perdana Menteri Abhisit memutuskan untuk mengambil jalan melalui jalan kekerasan guna menangani para demonstiran . Kudeta militer terjadinya karena menggulingkan Perdana Menteri Thaksin

³⁰ . “Thai Red Shirts protest against Thai Government, 2010” diakses dari <https://nvdatabase.swarthmore.edu> pada 19 Agustus 2018 pukul 19.00 .

Shinawatra pada 19 September 2006 beberapa tahun lalu dan akibatnya membawa dampak berupa dimana situasi demokrasi serta hak asasi manusia (HAM) di Thailand .

Sejak peristiwa tersebut militer menjadi aktor yang mendominasi dalam perpolitikan di Thailand dan keluar dari kotak parlemen dan PM serta menjadi sebuah kekuatan tersendiri . Struktur seperti kerajaan dan Privy Council merupakan lembaga tertinggi di Thailand . Militer sendiri kedudukannya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Perdana Menteri dan Kabinet . Pada akhirnya militer masuk kembali menjadi bagian dari perpolitikan di Thailand dikarenakan ada dua hal antara lain pertama gagalnya sipil dalam menjaga stabilitas negara menjadi penyebab adanya kudeta saat itu . Thaksin juga di tuduh tidak nasionalis di karenakan menjual saham The Shin corp kepada negara Singapura dan di tambah dengan penjualan saham perusahaan milik keluarga yang dibebaskan dari suatu pajak sehingga mempunyai keuntungan baginya . Permasalahan politik tahun 2006 berujung pada penggulingan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang di tandai dengan pendudukan kantor oleh pasukan Jenderal Sonthi. Raja juga disebutkan bahwa tidak suka dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang dianggap memimpin suatu negara layaknya pemimpinan di perusahaan . Ketidaksukaan terhadap Thaksin bukan oleh Raja saja tetapi juga dari sebageian kalangan militer terkait suatu kebijakan untuk para separatis di Pattani , Yala ,dan Narathiwat. Kedua , pasca terjadinya kudeta militer di tahun 2006 junta militer dibawah kepemimpinan Jenderal Sonthi Boonyaratglin untuk segera menepati janjinya berupa menyerahkan kekuasaanya kepada sipil paling lambat dua minggu setelah kudeta tersebut . Sesudah hal tersebut militer tidak dapat menghindarkan diri dari penetrasi politik dan akibat dari itu terlihat

pada pemilihan umum pasca kudeta di bulan Desember 2007 kemenangan atas People's Power Party (PPP) lalu naiknya Samak Sundaravej sebagai Perdana Menteri. Naiknya Samak Sundaravej sebagai Perdana Menteri ternyata membuat militer tidak merasa nyaman. Militer sendiri menilai bahwa mereka mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung aksi protes terjadap para Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) dan juga upaya mencari sebuah kesalahan guna mendelegitimasi suatu kekuasaan Samak . Di dalam krisis politik di tahun 2010 ini militer menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meninggalkan jalanan kota bangkok selama kubu kaos merah masih melakukan aksi demonstrasi³¹.

Selama mobilisasi politik dari Maret hingga Mei 2010 Thailand mengalami konfrontasi paling keras sejak terjadinya protes pada tahun 1992 . Sejak terjadinya aksi protes tersebut setidaknya 90 orang tewas dan lebih dari 2.000 terluka dalam aksi bentrok antara pasukan keamanan dan para demonstran anti pemerintah. Para demonstran anti pemerintah itu di pimpin oleh Front Persatuan untuk Demokrasi melawan kediktatoran. Sementara protes politik tersebut melumpuhkan ibukota selama kurang lebih tiga bulan. Kudeta juga mengantarkan pada periode ketidakstabilan politik yang serius dimana Thailand telah menghadapi kekerasan politik antara kaos kuning . Kaos kuning yang menentang resolusi politik untuk memungkinkan Thaksin untuk kembali berkuasa sedangkan “ kaos Merah”pro . Pengambilan kantor oleh Thaksin tidak mengakhiri keterlibatan didalam politik Thailand . Dari dalam pengasingan pun Thaksin telah mendukung proksi guna menciptakan serangkaian

³¹ . “ Jalan panjang demokrasi Thailand” diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id> pada 28 Mei 2018 pukul 10.00 .

partai politik untuk mendapatkan dukungan rakyat guna memenangkan pemilihan pada bulan Desember 2007. Pada pemerintahan perdana menteri Samak Sundaravej dan Somchai Wongsawat yang didukung Thaksin Shinawatra lalu disingkirkan dari kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi . Samak Sundaravej dan Somchai Wongsawat di singkirkan dari kekuasaan dengan alasan yang sah menurut hukum tetap terdapat motif politik . Adanya motif politik tersebut menyebabkan terjadinya protes di jalanan kota Bangkok dan mencapai puncaknya antara Maret sampai Mei 2010 di mulai pada 12 Maret dengan “ Million Man March” . Pada 12 Maret 2010 polisi memperkirakan bahwa sekitar 120.000 pengunjung rasa berkumpul di Kota Bangkok yang merupakan markas . Pos pemeriksaan polisi dan tentara yang diperintah oleh pemerintah tidak banyak menghentikan para pendemonstrasi dikarenakan petugas lebih suka menghindari mereka ³².

B. Partai Politik di Thailand

Evolusi partai politik di Thailand telah mengkonfrontasi sebagian permasalahan yang sama hal di negara lain . Pembentukan partai politik telah terjadi meskipun hanya dengan gerakan ke arah terbelakang pemilihan dan pembentukan badan legislatif yang representatif di tingkat nasional. Perkembangan ini telah terjadi secara perlahan dan tidak menentu dikarenakan sebuah kekuatan tradisional yang cukup kuat . Di Thailand kekuatan terbesar yaitu kelas petani ,dan kelas birokrasi kecil . Sejak perang dunia II

³². “Thailand’s 2010 Red Shirt Protests and the Government Crackdown” diakses dari <https://www.hrw.org> pada 1 Agustus 2018 pukul 15.00

pada lingkungan internasional juga terpengaruh terhadap kondisi internal dalam menghambat pembentukan partai politik. Kelompok revolusioner kecil telah menggulingkan monarki absolut di bulan Juni 1932 yang mana mereka menyebut dirinya sebagai “Partai Rakyat” atau “Promotor”. Kelompok atau organisasi ini terstruktur secara longgar dengan mengumpulkan koalisi yang beragam mengenai anggota. Koalisi tersebut terdiri dari perwira militer (Tua) yang dimotivasi adanya keluhan pribadi terhadap praktik diskriminatif keluarga kerajaan serta pemimpin militer dan sipil . Kesadaran terhadap politik sangat kurang hal itu menyebabkan kerajaan Thailand membuat sebuah organisasi politik bergaya barat . Partai Rakyat pun secara konsekuen di bubarkan dan partai politik secara resmi di larang saat itu . Meskipun di larang adanya partai politik tetapi para pemimpin baru tetap mempertahankan “politik informal” sampai perang dunia II. Kekuatan politik dilakukan oleh para pemimpin militer dengan mengandalkan kontrol mereka terhadap angkatan bersenjata terutama Angkatan Darat Kerajaan.

Pridi Phanomyong merupakan seorang tokoh utama di Partai Rakyat tahun 1932 dan muncul sebagai politisi sipil . Pada tahun 1946 larangan resmi mengenai partai politik diabaikan karena beberapa partai politik yang di organisir guna mengkampanyekan kursi terpilih dalam pemilu . Menciptakan sebuah House Of Representatives merupakan kebingungan dari aktivis politik yang demokratis dan mengakibatkan pridi mendapat peran sebagai perdana menteri. Pridi mempunyai sebuah rezim yang mengalami ketidakstabilan cukup besar yang disebabkan oleh ekonomi pasca perang. Pada bulan November 1947 baru saja membentuk sebuah kelompok militer (Rataprahan) lalu merebut kekuasaan dan menghapus semua partai politik . Upaya kedua pun dilakukan guna

mengembangkan partai politik yang terjadi selama pertengahan 1950 sesudah kembalinya Perdana menteri Pribun Songkhram .

Pemerintah akhirnya mengesahkan undang-undang mengenai partai politik agar banyak kelompok politik yang terorganisir bersaing dalam kursi terpilih di legislatif nasional . Pada tahun 1957 rezim pun runtuh saat Sarit melakukan kudeta dan memaksa Phibun dan Phao melarikan diri ke pengasingan politik . Sejak tahun 1945 partai tersebut telah berubah menjadi Partai Demokrat . Hal ini diselenggarakan oleh Khuang Aphaiwongse guna pemilihan umum pasca perang pertama dan hanya menjadi partai oposisi besar sejak saat itu . Partai Demokrat merupakan salah satu partai oposisi yang dipimpin oleh para pemimpin politik dan memiliki administrasi tingkat atas . Dulu Khuang Aphaiwongse merupakan seorang pembantu Pridi Phanomyong selama masa kudeta tahun 1932 dan memainkan perannya dalam faksi sipil dari pemerintahan konstitusi awal. Partai Demokrat merupakan partai tertua dan cukup banyak gelar di Thailand serta orientasi politiknya realtif moderat dan mempunyai tujuan utama yaitu mengubah kepemimpinan pemerintah dibanding kebijakannya . Partai Demokrat juga menentang kaum liberal dan di pimpin oleh Pridi Phanomyong . Keanggotaan Partai Demokrat lebih homogen selain dari partai pemerintah selain itu juga mengalami banyak perpecahan internasl dan divisi³³ . Nama “Demokrat” dipilih ketika pembentukan partai melalui cara yang mirip dengan Partai Demokrat AS. Demokrat mempunyai arti sebagai partai politik kelas pekerja dan orang miskin . Sejak awal ideologi milik Partai

³³. Darling , Frank C.1971. Political Parties in Thailand. Pacific Affairs. University of British Columbia. Vol 44 No 2 Hal 229-236.

Demokrat sudah menentang semua bentuk kediktatoran³⁴.

Pada akhir 1980an sistem partai politik di Thailand makin berkembang dan berada pada tahap transisi yang cukup rumit dari status sebelumnya sebagai tambahan bagi pembentukan birokrasi . Selain itu partai politik juga sebagai saluran untuk perwakilan rakyat dan penyedia eksekutif politik . Konsep partai politik pun kembali pada tahun 1930 tetapi memiliki dampak secara umum yang tidak signifikan . Perebutan kekuasaan hampir selalu diselesaikan secara kudeta dan adanya tuntutan pluralistik masyarakat. Selama beberapa dekade partai politik memiliki status yang tidak menentu . Politik partai mendapatkan dorongan yang besar dari pemberontak mahasiswa pada bulan oktober 1973. Pada 1975 sebanyak empat puluh dua partai berpartisipasi dalam pemilihan parlemen dan tiga puluh sembilan di tahun berikutnya³⁵ . Sistem partai menggambarkan bahwa adanya perpecahan sosial hanya sampai batas tertentu saja . Pada tahun 1992 terjadi polarisasi antara partai politik yang mendukung demokrasi . Partai politik yang sekarang ini cukup sulit masuk ke masyarakat dan terutama di luar kota Bangkok . Tingkat kelembangaan mereka juga rendah terdapat beberapa perbedaan diantara partai politik . Pada tahun 1997 Thaksin Shinawatra meninggalkan Partai Palang Dharma yang didirikan di tahun 1988 oleh gubernur Bangkok . Salah satunya partai politik dengan tradisi yang cukup lama adalah Partai Demokrat . Partai Demokrat didirikan di tahun 1946

³⁴ . “ History the Democrat Party “ diakses dari <https://www.thaiembassy.sg> pada 23 Agustus 2018 pukul 09.00 .

³⁵ “ Political Parties” diakses dari <http://countrystudies.us> pada 13 Agustus 2018 pukul 12.00

yang mana telah melakukan sebuah dukungan terhadap aksi protes mahasiswa pada tahun 1973 dan melakukan perang melawan Suchida . Lalu di tahun 1997 ada rencana guna meniadakan institusi dari partai politik dengan mengubahnya dalam bentuk konstitusi³⁶ .

Diantara september 1992 dan April 2006 semua pemerintahan dibentuk oleh partai yang mayoritas menduduki parlemen . Meskipun demikian tidak ada partai tunggal memperoleh mayoritas dalam pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 1992,1995 dan 1996. Partai Demokrat telah menjadi yang paling berhasil dalam menyusun koalisi guna membentuk pemerintahan . Chuan Leekpai merupakan pemimpin Partai Demokrat antara tahun 1992 ,1995, 1997 dan 2001. Namun pemerintahannya tidak stabil serata di antara periode tahun 1995 dan 1997 terdapat dua kali pemilihan umum ³⁷.Komitmen Partai Demokrat untuk demokrasi ,aturan hukum serta masa depan Thailand telah hancur Partai Demokrat juga mempunyai kursi politisi serta penasihat yang dapat berkomitmen terhadap demokrasi liberal tetapi dikarenakan kinerja di wilayah pedesaan dan kelas menengah menjadi lebih berdaya . Demokrat pun menjadi lebih konservatif ,elitis dan anti demokrasi dan cara itu tidak membantu memenangkan pemilu ³⁸. Partai Demokrat mempunyai banyak keluhan dengan partai yang di

³⁶ Andreas Ufen .” The institutionalisation of Political Parties in Southeast Asia” diakses dari <http://www.kas.de> pada 13 Agustus 2018 pukul 23.00.

³⁷ “ Partial democracy and the search for a new political order” diakses dari <https://www.britannica.com> pada 14 Agustus 2018 pukul 09.00.

³⁸ . Joshua Kurlantzick .” Demise of the Democrat Party in Thailand” diakses dari <https://www.cfr.org> pada 12 Agustus 2018 pukul 22.00.

pimpin oleh Thaksin Shinawatra dan dianggap sebagai beban terhadap beberapa tagihan pengeluaran , prosedur pemberian suara di parlemen . Namun menurut partai yang sudah lama menumbuhkan citra sopan dan intelektual serta mengadvokasi penyelesaian perbedaan di dalam parlemen, keputusan untuk turun ke jalanan menjadi perdebatan . Langkah yang di lakukan oleh partai tersebut memiliki kesejajaran dan mengkhawatirkan kesamaan ketika tujuh tahun lalu . Di tengah kampanye protes jalanan terhadap Thaksin lalu perdana menteri Partai Demokrat memboikot pemilihan umum di bulan April 2006 . Sebelumnya Partai Demokrat merupakan pendukung serta penerima adanya intervensi oleh militer dan saat ini mulai berputar balik . Kepemimpinan partai yang sekarang menentang Junta Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) serta menekankan dilaksanakannya pemilihan umum sesuai dengan apa yang sudah di jadwalkan . Di era sekarang ini Partai Demokrat bisa menjadi sebuah kekuatan pendorong yang signifikan dalam kegiatan demokrasi di Thailand setelah kurun waktu empat tahun negara ini di bawah pemerintahan junta . Partai Demokrat telah memenangkan pemilihan umum selama tiga dekade yang lalu pada tahun 1992 . Namun sejak munculnya Partai Pheu Thai kepopuleran partai tersebut kalah .Demokrat pun masih mempertahankan basis kekuataannya di bagian selatan. Meskipun demikian hanya dengan jumlah 6,2 juta pemilih di selatan maka Partai Demokrat akan kekurangan dukungan guna memenangkan pemilihan umum sedangkan kekuatan Politik Partai Pheu Thai di wilayah utara dan timur laut sekitar 24,9 juta pada tahun 2011. Selama konflik politik Demokrat terus melakukan berbagai upaya

dengan cara retorika pembelian suara khususnya di bagian timur laut³⁹ .

Partai Pheu Thai (PTP) merupakan partai baru untuk faksi politik lama serta telah memenangkan disetiap pemilihan nasional yang diadakan pada tahun 2001 dan seterusnya sebanyak enam kali. Selama periode tersebut Keluarga Shinawatra telah di paksa untuk berkuasa sebanyak tiga kali oleh pendiri politik konservatif . Selain itu Shinawarta sebanyak dua kali juga di kudeta oleh militer di tahun 2006 dan 2014 . Selama kurang lebih dua tahun miliader telekomunikasi yaitu Thaksin Shinawatra merupakan pemegang pengikut setia orang miskin di pedesaan khususnya di bagian utara dan timur . Sejak tahun 2006 guna menghindari tuduhan atas tindakan kriminal maka Thaksin pergi ke luar negeri . Thaksin juga sebagai pemberontak populis, kebijakan akan perawat medis murah , keringanan terhadap utang dan sangat populer di kalangan kelas pekerja⁴⁰ .

C. Kekuatan militer Thailand

Angkatan Darat milik kerajaan Thailand merupakan yang paling tua dan terbesar serta secara tradisional berfungsi sebagai sistem pertahanan kerajaan . Memiliki Panglima tertinggi dan staf spesialis militer yang berkedudukan di pusat kota Bangkok serta mengarahkan tentara mereka untuk

³⁹ . Titipol Phakdeewanich . “ Can Thailand rely on the Democrat Party for democracy?” diakses dari <http://www.nationmultimedia.com> pada 23 Agustus 2018 pukul 10.00.

⁴⁰ . Neil Thompson . “ Thailand's Junta Cracks Down on Thaksin's Pheu Thai Party” diakses dari <https://thediplomat.com> pada 23 Agustus 2018 pukul 18.30 .

menjalankan sebuah misinya .Tentara beroperasi melalui empat komando tentara regional . Angkatan darat pertama berkantor di pusat kota Bangkok yang memiliki tanggung jawab atas provinsi bagian barat dan tengah serta ibu kota negara Thailand . Pasukan tentara diorganisasikan kedalam tujuh divisi infanteri, delapan batalion infanteri independen, dua divisi pasukan khusus dilatih dan udara unit kecil serta satu divisi artileri pertahanan udara . Misi utama dari tentara adalah mempertahankan negara dari agresi oleh pasukan darat asing selama bertahun – tahun invasi dianggap tidak mungkin oleh para pemimpin sipil dan militer . Unit utama Angkatan darat pertama yang ditempatkan secara permanen di ibukota sering kali menyediakan cadangan militer guna kudeta para perwira senior militer . Di waktu lain digunakan oleh para perwira militer yang berkuasa untuk mencegah aspirasi kudeta dari faksi- faksi ⁴¹.

Pada saat pembentukan militer profesional yang terlatih secara teknis adalah sebuah pencapaian penting dari adanya reformasi modernisasi yang digunakan pada akhir abad ke 19. Pada tahun 1920an militer telah muncul sebagai institusi pemerintahan paling kuat juga termasuk banyak perwira yang telah bangkit karena adanya pelatihan dan kemampuan . Para perwira tersebut memainkan peran penting dalam peristiwa penggulingan sistem monarki absolut menjadi konstitusional di tahun 1932. Militer termasuk tentara , angkatan laut serta angkatan udara meskipun demikian tentara selalu menjadi dominan . Semua warga negara yang berjenis kelamin laki-laki diharuskan mendaftar untuk sebuah rancangan di usia 18 tahun . Hanya sebagian kecil yang dipilih untuk melakukan wajib

⁴¹ “ Royal Thai Army” diakses dari <https://www.globalsecurity.org/military> pada 8 Agustus 2018 pukul 21.00

militer selama 2 tahun dimulai pada usia 21 tahun dan sebagainya dari mereka di lantik menjadi tentara⁴². Sejak pada awal abad ke 21 angkatan darat milik Kerajaan Thailand merupakan unit terbesar di negara tersebut. Angkatan daratnya pun telah memerangi peristiwa pemberontakan di provinsi paling selatan negara Thailand yang kebanyakan di huni oleh orang muslim berbahasa melayu . Tentara angkatan darat tersebut juga ikut menghadapi serangan yang terdapat di perbatasan wilayah barat dengan utara oleh gerilyawan . Gerilyawan tersebut ikut serta dalam memerangi pemerintahan di Myanmar oleh pasukan militer milik Myanmar yang kadang juga mengejar para pemberontak di seberang perbatasan . Angkatan darat telah memainkan peran yang dominan dalam politik di Thailand terutama sejak berakhirnya masa pemerintahan monarki absolut oleh Raja pada tahun 1932. Protes terhadap publik cukup kuat mengenai kudeta di tahun 1991, terjadinya pengunduran diri adanya intervensi kerajaan oleh pihak pemerintah yang dipimpin seorang jenderal pada tahun 1992⁴³.

Militer Thailand selalu terlibat dalam hal politik baik melewati kudeta maupun dengan cara lain . Dalam seratus tahun terakhir telah terdapat 19 upaya kudeta yang mana 11 diantaranya mengalami keberhasilan dan 3 diantaranya dihitung sebagai penggulingan atau perubahan monarki absolut menjadi monarki konstitusional . Kedua kudeta tersebut bertujuan untuk melestarikan demokrasi yang sedang berkembang sehingga sering menyebut dirinya sebagai kekuatan .

⁴² ” Government and society in Thailand” diakses dari <https://www.britannica.com> pada 20 juni 2018 pukul 09.00

⁴³ . “ Thailand: Coups That Helped Shape the Land of Coups” diakses dari . <http://time.com> pada 3 juli 2018 pukul 08.00

Militer telah mempengaruhi politik baik dalam skala kecil maupun besar . Ketika monarki absolut berakhir pada tahun 1932 kudeta rata – rata terjadi sekali setiap empat tahun . Selama beberapa abad yang lalu kudeta telah dicoba oleh faksi ideologis dan baru ini dengan faksi kelas militer horisontal . Awalnya dari tahun 1932 hingga sekitar 1950 sebagian kudeta bersifat ideologis . Konflik pertama pun terjadi antara demokrat dan monarkis dan sekitar 1950 hingga 1970 kudeta dipimpin oleh faksi vertikal terutama untuk berusaha mempromosikan kepentingan militer , politik serta bisnis anggota . Sejak pertengahan tahun 1970 banyak sekali kudeta berdasarkan pada kelas akademi militer.

Pemerintahan militer semakin diperkuat ketika Marshal Sarit pada kudeta tahun 1958 . Kudeta pada tahun 1958 mempunyai karakteristik khas adalah kombinasi dari konservatisme dan kapitalisme⁴⁴.

Militer tidak seperti kebanyakan negara di dunia yang lebih dari sekedar penyedia pertahanan nasional. Hal tersebut dirasakan oleh kalangan publik sebagai pembela raja dan kebanggaan nasional . Peran kuat yang di miliki oleh militer dalam tatanan sebuah politik Thailand sejak tahun 1932 yaitu keamanan . Keamanan tidak pernah menjadi tugas utama dalam militer tetapi birokrasi bersenjata . Militer Thailand sering menghindari situasi dimana memiliki potensi berbahaya sebagai gantinya perwira lebih suka mengabdikan energi untuk profesi bisnis serta politik. Dalam bisnis mereka telah melakukan penyelundupan , menebangi dan mengambil keuntungan yang berasal dari sumber daya alam milik negara . Dalam hal politik bahwa mereka mengklaim dirinya sebagai jabatan politik tertinggi dikarenakan banyak perdana menteri

⁴⁴ . Bunbongkarn.Suchit, “ The military and democracy in Thailand”. Jstor

mempunyai latar belakang militer. Militer Thailand menggunakan berbagai macam strategi untuk membangun sebuah kekuatan dan pengaruhnya yaitu

- 1) Militer menampilkan dirinya sebagai pusat pemain dalam menciptakan sebuah negara yang modern terbukti pada tahun 1932 monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional .
- 2) Selamanya terjadinya perang dingin militer mewakili dirinya sebagai institusi yang terlibat dalam pemberantasan ancaman kaum komunis ,baik secara eksternal dan domestik .
- 3) Militer membentuk aliansi yang sangat kuat dengan Amerika serikat selama era

Vietnam dan merupakan penerima bantuan serta pelatihan⁴⁵ .

Sejak berakhirnya peristiwa penggulingan dan pergantian kekuasaan dari monarki absolut ke monarki konsitusional pada tahun 1932 mengakibatkan kerapuhan lembaga perwakilan dan apatisme politik publik . kerapuhan lembaga perwakilan dan apatisme politik publik telah memungkinkan militer untuk mengendalikan sebuah kekuasaan negara . Selama 60 tahun terakhir perjuangan atas kekuasaan antara kaum laki-laki berseragam dengan politisi sipil sudah tergambar dalam rangkaian kudeta militer yang berkelanjutan guna mengontrol negara . Angkatan bersenjata bukan hanya peduli terhadap pertahanan

⁴⁵ . Security, Development and Political Participation in Thailand: Alternative Currencies of Legitimacy, 51-52,

nasional saja tetapi juga dengan dimensi dari dalam keamanan nasional antara lain stabilitas politik. Melalui kontrol yang efektif atas adanya aparat negara khususnya kepolisian dan layanan sipil . Militer juga telah mengambil sebuah keputusan politik yaitu kursus atas perubahan politik yang belum di tetapkan oleh politisi sipil atau partai politik . Selain itu sistem kepartaian lebih jauh di banding dari lembaga dan kurangnya dukungan oleh massa mengakibatkan adanya pemisahan antara demokrasi dan pemerintahan militer tetap .

Sebelum tahun 1980an biasanya proses politik di Thailand dikendalikan oleh kaum elit yang mempunyai kekuasaan berasal dari militer . Namun pada dasarnya gagasan pemerintahan parlementer itu pertama kali terdapat dalam konstitusi tahun 1930an. Thailand mempunyai hak pilih universal sejak 1932 dan usia untuk pemilih yaitu 18 keatas . Meskipun tidak terdapat undang-undang yang menjelaskan mengenai larangan kaum wanita terlibat dalam perpolitikan tetapi hanya sedikit dari mereka mencalonkan diri untuk pemilihan legislatif itu . Parlemen yang sudah terpilih mulai mendapatkan pengaruh dari proses politik di tahun 1980an dan sejak saat 1992 kekuasaan pemerintah sudah dilaksanakan melalui Majelis Nasional kecuali untuk periode 15 bulan pada 2006-2007 saat militer sedang mengambil alih . Peran yang dimainkan oleh militer dalam proses politik Thailand menggambarkan sebuah prinsip . Prinsip tersebut sering diucapkan oleh para pemimpin angkatan bersenjata bahwa hanya militer yang disiplin dan baik dapat menjaga ketertiban umum serta melindungi konstitusi monarki . Adanya prinsip tersebut telah ditentang baik dalam maupun di luar legislatif yang dikembangkan dan disahkan oleh Majelis Nasional terpilih sebagai basis untuk beragam masyarakat . Beragamnya masyarakat seperti politisi militer, pejabat

terpilih yang sering menggunakan kekuasaan mereka guna memajukan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2006 tentara memiliki sebuah alasan khusus untuk berpartisipasi . Pihak Thaksin pun berusaha untuk memimpin tentara yang di bawah kendalinya . Pegawai lama di militer dan banyak bawahan datang untuk membenci hal ini . Tentara mencuri kesempatan guna mendapatkan sebuah penebusan untuk peran militer pada tahun 1932. Pada tahun 1932 yang mana saat itu telah mengurangi status mereka secara dramatis. Tentara sudah lama ingin mendapatkan kembali beberapa peran dan mempunyai kesempatan untuk menggulingkan perdana menteri Thaksin . Kelas menengah pada awalnya menyebut perdana menteri Thaksin pada tahun 2001 sebagai pemimpin guna melanjutkan reformasi modernisasi dimulai sejak 1990an . Dukungan yang diberikan oleh mereka hanya bertahan selama kurang lebih empat tahun . Pada tahun 2005 mereka berbalik melawannya dengan cara yang cukup kejam dan sangat emosional . Kelas menengah mempunyai tiga ketakutan yaitu sangat berbahaya apabila suatu negara di dominasi oleh suatu kelompok besar dan berkepentingan dalam bisnis korupsi. Kedua bahwa mereka harus melakukan pembayaran kebijakan populisme milik Thaksin melalui pajak yang mengalami peningkatan dengan adanya kekacauan ekonomi . Ketiga bahwa formula Thaksin merupakan aliansi uang dan bilangan terbesar yang akan membuat kelas menengah secara politis tidak relevan ⁴⁶.

Raja adalah kekuatan yang menstabilkan dan tidak memperdulikan seberapa banyak politisi bertengkar di antara mereka baik dengan pihak militer. Kondisi raja sekarang sudah berusia 86 tahun dan lemah . Putranya

⁴⁶ Jackson,Gerald .Thailand and the 2006 coup. Nordic Institute of Asian Studies. Denmark

yang saat ini menjadi putra mahkota kurang begitu populer menyebabkan banyak memunculkan pertanyaan tentang peran apa saat ini dan masa depan. Militer sejauh ini merupakan kekuatan paling kuat di negara Thailand dan dapat merebut kekuasaan tanpa ada tantangan serius. Negara ini menjadi sasaran bahkan lebih jika bukan dikarenakan adanya fakta bahwa militer telah memerintah untuk diwaktu yang cukup lama. Kecenderungan Thailand untuk melakukan sebuah kudeta dikarenakan militer selalu memainkan peran utama dalam politik serta demokrasi. Ketika jenderal Prayuth Chan-Ocha mengumumkan darurat militer tetapi pihak militer mengklaim bahwa itu bukanlah kudeta⁴⁷. Ketika Prayuth Chan-Ocha menguasai Thailand dalam sebuah kudeta militer dengan penuh semangat mencela bahwa para politisilah yang bertanggungjawab atas penyakit negara dan memposisikan dirinya. Empat tahun kemudian dalam kondisi masih banyak masalah serta masih membekas dan masyarakat semakin tidak sabar untuk melakukan pemilihan umum yang sempat tertunda lama. Satu-satunya negara di dunia yang masih di bawah kekuasaan militer formal dan berada di bawah tekanan meningkat baik dari dalam maupun luar negeri untuk kembali ke pemerintahan sipil. Thailand telah mengalami penderitaan lebih dari satu dasawarsa dengan adanya pergolakan politik termasuk dua kudeta dan beberapa putaran protes jalanan. Shinawatra pada dasarnya mengubah tatanan politik Thailand dengan kebijakan populis yang bertujuan untuk merayu mayoritas pedesaan yang miskin negara itu tetapi saat mereka berkuasa juga di rusak dengan adanya tuduhan korupsi. Mencegah kembali dekade yang hilang dari bahaya nasional junta pun menyusun sebuah konstitusi.

⁴⁷ Greg Myre. "Why does Thailand have so many coups?" diakses dari <https://www.npr.org> pada 9 Agustus 2018 pukul 15.00

Penyusunan konstitusi tersebut membuat partai – partai politik tidak mendukung badan yang tidak terpilih . Junta sendiri akan menunjukan beberapa orang yang akan melakukan penunjukan termasuk seluruh majelis tinggi parlemen⁴⁸ .

Thailand saat ini sedang dalam posisi dibawah rezim militer paling keras dilihat sejak awal tahun 1970an . Tahun 1970an merupakan era dimana gerilyawan komunis didukung oleh china mengancam akan menggulingkan tatanan monarki dan militer . Meskipun terdapat kontroversi tentang peraturan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) junta adalah rezim militer . Proyek dimasa depan penting untuk memahami masa lalu Thailand pasca terjadi kudeta militer tahun 2014 . Kudeta tahun 2014 merupakan tanda dari kebangkitan atas gejolak jalanan pada awalnya ditunjukan sebuah RUU amnesti yang bertujuan untuk membuka jalan bagi mantan perdana menteri Thaksin . Aksi protes pun semakin luas jika tidak ada suara menyerukan pemerintahan yang lebih bersih dengan mengakhiri korupsi dan perombakan politik demokratis . Betapa mudahnya militer mengkonsolidasikan kekuatannya dengan pertarungan politik sebelum kudeta 2014. Kebebasan sipil telah diredam secara tajam para lawan politik pun telah di ancam serta dilecehkan , pers di intimidasi dan disensor . Langkah tersebut awalnya digunakan guna melawan ancaman bahwa sekutu Thaksin akan melancarkan tanggapan pemberontak terhadap kudeta. Namun tidak satu pun ancaman itu datang dari hasil

⁴⁸ ”Thai Junta Boss Eyes Staying on With Little Stopping Him” diakses dari <https://www.voanews.com> pada 9 Agustus 2018 pukul 22.00

kudeta. Ancaman untuk merebut aset pribadi para pemimpin kaos merah yang diselidiki secara baik ⁴⁹.

⁴⁹ Crispin, Shawn W.” The Staying Power of Thailand’s Military” diakses dari <https://thediplomat.com> pada 10 Agustus 2018 pukul 1.27